

**TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM
PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

YOHANES YORIANUS MEO DHE
NIM. 2021110953

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM
PELEKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

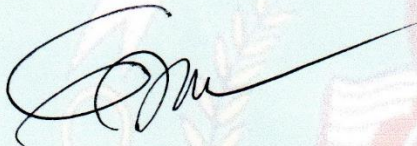
SKRIPSI

OLEH:

**YOHANES YORIANUS MEO DHE
NIM: 2021110953**

Disetujui

Pembimbing I



**Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum
NIDN : 0810048201**

Pembimbing II



**Bernardus Basa Kelen, SH.,M.Hum
NIDN : 0814077102**

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora

Universitas Flores




**Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701**

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Flores




**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801**

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM
PELEKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

SKRIPSI

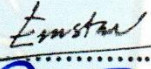
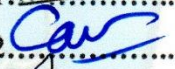
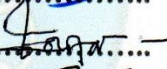
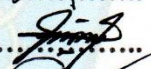
DISUSUN OLEH :

YOHANES YORIANUS MEO DHE

NIM : 2021110953

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN OLEH DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.  |
| 2. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Dr. Alfonsius Fa, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. Bernardus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.  |
| 5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota) | 5.  |

MENGESAHKAN

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN. 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Hendrikus Harpon, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yohanes Yorianus Meo Dhe
Nim : 2021110953
Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/ Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 30 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Yohanes Yorianus Meo Dhe
NIM: 20201110097

MOTO

*"JANGAN PERNAH MENYERAH, KARENA SESUATU
YANG BAIK MEMBUTUHKAN PROSES"*

BY:

*YOHANES YORIANUS MEO DHE
2021110952*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan tulus hati untuk :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa menyertai, membimbing dan memberkati hidup dan usahaku.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Adianus Dapa dan Fransiska Mau yang selalu memberikan doa dan kasih sayang serta dukungan material maupun moril kepadaku.
3. Kakak-kakaku tercinta Lestin kue dan Kris co'o yang dengan setia menantikan keberhasilanku.
4. Sahabat-sahabatku tercinta Ones, Ilnus, Ven, Ros, Bertin, Gons,Santi,Anjel yang telah setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Flores.
6. Agama, Bangsa dan Negara.
7. Kepda diri peneliti Yohanes Yorianus Meo Dhe,terimakasih karena sudah terus berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun sering merasa lelah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat, berkat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Uneversitas Flores Bapak Dr. Laurentius Dominikus Djou, Akt.
2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Willybrudus Lanamana, S.E., M.M.A. beserta jajaran yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas.
4. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum Bidang Akademik.
5. Wakil Dekan Ii Ibu Ernesta Aita Ari S.H.,M.Hum Bidang Adminitrasi Umum, Keuangan dan Kepegawian.
6. Wakil Dekan Iii Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum Selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
8. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum atas ilmu selama masa studi
9. Karyawan dan Karyawati Program studi Ilmu Hukum.
10. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah

mengorbankan waktu dan tenaga untuk membimbing, memotivasi mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo dan stafnya, yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama kegiatan penelitian.

12. Teman-teman seangkatan 2021 Progran Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu untuk diperbaiki kembali, oleh karena itu dengan rendah hati penulis menerima usul dan saran yang baik demi penyempurnaan skripsi ini.

Ende, Agustus 2025



Penulis

ABSTRAK

YOHANES YORIANUS MEO DHE:“ *TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*”. SKRIPSI. ENDE: PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS FLORES, 2025.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam penyelenggaraan pelatihan kerja merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menanggulangi pengangguran di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan program pelatihan kerja. Namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, dan sering kali mendapat keluhan dari masyarakat karena belum memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan pelatihan kerja, mengevaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo serta peserta pelatihankerja. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, seperti pelatihan pengolahan jamur tiram, pelatihan mebeler, pelatihan baja, serta cabinet making. Meskipun program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja mandiri, pelaksanaannya belum efektif karena kurangnya tindak lanjut dan pemantauan hasil pelatihan. Beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaan pelatihan kerja meliputi keterbatasan anggaran, minimnya tenaga instruktur yang berkompeten, rendahnya motivasi dan partisipasi masyarakat, serta fasilitas pelatihan yang belum memadai. Diperlukan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta perencanaan berkelanjutan agar pelatihan kerja dapat menjadi solusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pelatihan Kerja*

ABSTRACT

YOHANES YORIANUS MEO DHE. “*THE RESPONSIBILITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF NAGEKEO REGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF JOB TRAINING VIEWED FROM LAW NUMBER 23 OF 2014 ON REGIONAL GOVERNMENT.*” THESIS. ENDE: STUDY PROGRAM OF LAW, FACULTY OF LAW AND SOCIAL HUMANITIES, FLORES UNIVERSITY, 2025.

The responsibility of the Regional Government of Nagekeo Regency in implementing job training programs is a crucial aspect in improving the quality of human resources and reducing unemployment at the regional level. According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, local governments are authorized to manage labor-related affairs, including the implementation of job training. However, in practice, this responsibility has not been fully carried out effectively and often receives criticism from the public due to the lack of significant outcomes in improving community skills and productivity. This study aims to examine the forms of responsibility held by the Regional Government of Nagekeo in executing job training, evaluate the effectiveness of the training programs, and identify the various challenges encountered in the process. Informants in this research include officials from the Department of Transmigration and Manpower of Nagekeo Regency and former participants of the job training programs. The findings reveal that the government has implemented various types of job training, such as mushroom processing, furniture making, metalwork, and cabinet making. Although these programs are intended to improve participants' skills and foster entrepreneurship, their implementation has not yet reached optimal results due to a lack of follow-up and program sustainability. Several factors hindering the success of job training implementation include limited budget allocations, insufficient number of qualified instructors, low community participation and motivation, and inadequate training facilities. Therefore, strategic efforts are needed to strengthen institutional capacity, ensure proper planning, and provide adequate support so that job training can effectively contribute to community empowerment.

Keywords: *Responsibility, Regional Government, Job Training*

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Analisis Penelitian	9
G. Lokasi	10
H. Sistematika.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Tentang Tanggung Jawab.....	13
1. Pengertian tanggung jawab	13
2. Tanggung jawab dan kewajiban	14

3. aspek-aspek tanggung jawab	17
B. Pelaksanaan Pelatihan Kerja	18
1. Pengertian pelatihan kerja	18
2. Tujuan pelatihan kerja	19
3. Manfaat pelatihan kerja	22
4. Pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	24
C. Pemerintahan Daerah	26
1. Pengertian pemerintahan daerah	26
2. Tugas dan tanggung jawab	27

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO

DALAM PELAKSANAAN PELATIHANKERJA29

A. Profil Organisasi Pemerintah Daerah Teknis Pelaksana Pelatihan Kerja	29
B. Ketentuan Peraturan Tentang Tanggung Jawab Pemda.....	37
C. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Oleh Pemerintah Daerah Nagekeo	39

BAB IV FAKTOR YANG MENYEBABKAN HAMBATAN PELAKSANAAN

PELATIHAN KERJA53

A. Keterbatasan Anggaran Daerah	53
B. Fasilitas Yang Tidak Memadai	56
C. Belum Tersedianya Tenaga Fungsional Instruktur Pelatihan Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo.....	59
D. Rendahnya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Keterampilan Atau Skill.....	63

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN